

INFO BPK

NDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME

EDISI VII/2016

UTAMA

BPK GELAR PERTEMUAN TERTUTUP DENGAN KPK



Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan untuk membahas kelanjutan dugaan penyimpangan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan tertutup yang dilaksanakan di Kantor Pusat BPK pada Senin (20/6) tersebut berlangsung sekitar satu jam dan menghasilkan 5 (lima) poin kesepakatan antara pimpinan BPK dan Komisioner KPK.

Kesepakatan yang disampaikan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo dihadapan para wartawan diantaranya yaitu pimpinan BPK dan KPK sepakat untuk menghormati kewenangan masing-masing lembaga dan kedua lembaga telah melaksanakan kewenangannya masingmasing.

Poin berikutnya, ketua KPK melanjutkan, bahwa sampai saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, sehingga permasalahan RSSW belum dibawa ke ranah penyidikan tipikor.

Namun demikian, Ketua KPK menyatakan hal tersebut bukan berarti

bahwa KPK menyangkal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi BPK. "KPK menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, sehingga belum membawa permasalahan RSSW ke ranah penyidikan tipikor. KPK tidak menegasikan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi yang telah disampaikan BPK kepada KPK," ungkapnya.

Poin berikutnya yaitu, BPK menyatakan bahwa telah

terjadi penyimpangan dalam permasalahan RSSW, sehingga Pemprov DKI Jakarta harus menindaklanjuti LHP BPK tersebut.

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 23E Ayat 3, Ketua BPK, Harry Azhar Azis menambahkan, Pemprov DKI Jakarta harus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 yang telah diterbitkan oleh BPK. "Meskipun hingga kini, KPK belum menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pemprov DKI harus tetap menindaklanjuti LHP BPK," tegasnya.

Sementara itu, terkait perbedaan pandangan antara BPK dan KPK, Ketua BPK mengatakan, laporan hasil audit investigasi sudah diserahkan ke KPK, kewenangan sudah ada di tangan KPK. "Tujuan kami ingin membantu KPK apakah ada



atau tidak pelanggaran itu. Apa pun keputusan KPK, itu kewenangan yang dimiliki KPK," pungkasnya.

Selanjutnya poin kelima pada kesepakatan tersebut, dinyatakan bahwa KPK dan BPK tetap saling bersinergi mencegah dan memberantas korupsi.

DARI REDAKSI

Salam hangat dari redaksi Buletin Info BPK RI kepada seluruh pembaca.

Segenap tim redaksi Buletin Info BPK RI mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin".

Mengawali edisi kali ini, Buletin Info akan membahas hasil pertemuan tertutup antara BPK dengan KPK terkait kelanjutan dugaan penyimpangan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan kesepakatan untuk menghormati kewenangan masing-masing lembaga dan kedua lembaga telah melaksanakan kewenangannya masing-masing.

Di rubrik lainnya akan membahas penyerahan LHP kepada Kemenkes, Kemendikbud, dan BPOM dilakukan oleh Anggota VI BPK RI. Kementerian/lembaga tersebut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

BPK mengapresiasi K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selain itu BPK juga merekomendasikan K/L untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal terhadap pengelolaan realisasi belanja sesuai dengan ketentuan, serta penatausahaan dan inventarisasi aset secara memadai dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Indonesia dewasa ini sedang dihadapkan pada permasalahan pangan. Terkait ketahanan dan kedaulatan pangan, BPK juga telah melaksanakan beberapa pemeriksaan diantaranya program swasembada sapi tahun 2010, kinerja pencapaian swasembada beras tahun 2012, kinerja pencapaian swasembada gula nasional tahun 2013, dan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengadaan beras tahun 2013 sampai tahun 2015 pada Kementerian Pertanian dan Instansi terkait lainnya.

Tak lupa cuplikan kegiatan BPK RI di perwakilan akan membahas Sosialisasi Kegiatan Pengawasan pada BPK Perwakilan Riau, penyelenggaraan kegiatan Media Workshop dengan tema "Mewujudkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat" di kantor BPK Perwakilan Kaltara, serta pelaksanaan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 5 (lima) entitas pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selamat membaca dan berkarya!

DAFTAR ISI

- DARI REDAKSI
- BPK GELAR PERTEMUAN TERTUTUP DENGAN KPK
- PERMASALAHAN PANGAN NASIONAL MENJADI PERHATIAN DAN PERTIMBANGAN BPK DALAM MERANCANG PERENCANAAN PEMERIKSAAN
- BPK SERAHKAN LHP KEPADA KEMENKES, KEMENDIKBUD, DAN BPOM
- BPK APRESIASI K/L YANG MEMPEROLEH OPINI WTP
- 24 K/L MEMPEROLEH OPINI WTP
- GALERI FOTO
- . KABAR SELINTAS
- · LINTAS PERWAKILAN
- · KOLOM
- CASCISCUS
- KOREK PERS

PERISTIWA

PERMASALAHAN PANGAN NASIONAL MENJADI PERHATIAN DAN PERTIMBANGAN BPK DALAM MERANCANG PERENCANAAN PEMERIKSAAN

Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan pangan. Kesenjangan antara kebutuhan pangan dan pengadaan pangan menjadi pemicu terjadinya kegaduhan publik, terutama mengenai apakah pengadaan pangan dipenuhi dari dalam negeri atau impor. Selain itu, sejauh mana Indonesia dapat mengkalkulasi kebutuhan pangan secara tepat dan akurat, serta strategi apa yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan pangan nasional.

Untuk mendapatkan masukan dan solusi bagi pengadaan pangan nasional, BPK menggelar Rapat Koordinasi "Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan dalam Negeri vs Impor", Selasa (21/6). Rapat yang berlangsung di Auditorium BPK Pusat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, Anggota IV BPK, Rijal Djalil, Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, Ketua HKTI, dan Pengamat Pertanian Bustanul Arifin.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja kebijakan pangan dan implementasinya, termasuk pemeriksaan kinerja pengadaan dan penyaluran pupuk. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan dalam pengadaan pangan dan pupuk di Indonesia.

"BPK akan mengawal dan memastikan prioritas pembangunan nasional yang telah direncanakan dilaksanakan dan dilaporkan secara trasnparan, akuntabel serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan demikian kedaulatan pangan akan menjadi perhatian

PENGADAAN DALAM NEGERI VS IMPOR
(HASILALDIT BPK RI)

dan pertimbangan BPK dalam merancang perencanaan pemeriksaan" tegas Wakil Ketua.

Terkait ketahanan dan kedaulatan pangan, BPK juga telah melaksanakan beberapa pemeriksaan diantaranya program swasembada sapi tahun 2010, kinerja pencapaian swasembada beras tahun 2012, kinerja pencapaian swasembada gula nasional tahun 2013, dan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengadaan beras tahun 2013 sampai tahun 2015 pada kementerian pertanian dan instansi terkait lainnya.

BERITA FOTO =



Sholat Berjamaah

Kegiatan sholat idul fitri 1437 H yang dilakukan di halaman Kantor Pusat BPK RI yang dihadiri oleh sejumlah pejabat BPK, pegawai BPK serta warga sekitar di lingkungan Kantor Pusat BPK RI pada tanggal 6 Juli 2016.

>> REDAKSI

- :: R. Yudi Ramdan Budiman, Adelina Silalahi, Sri Haryati, Reza Hadi Satria, Siti Hasnawati, Waskito Tri Endroputro, Joko Indra Irawan, Ferdian Ade Irwanto, Utari Hasanah, Enda Nurhenti :: Alamat Redaksi: Jl. Gatot Subroto No. 31 :: Jakarta Pusat 10210 :: Telepon: 021 - 25549000 ext. 1184 dan 1188 :: Fax: 021 - 57953198 ::
- :: Redaksi menerima kiriman berita/ informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan ke-BPK-an lainnya ::

< KOLOM

BPK New Era

Pastinya kita semua sepaham bahwa kepemimpinan (Leadership) merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Sebagai atribut umum yang melekat dalam diri seorang pemimpin yang baik, kepemimpinan sangat mempengaruhi lingkungan organisasi dan sangat berperan dalam menentukan arah organisasi tersebut. Menyadari pentingnya peran pemimpin dalam suatu organisasi, memasuki paruh kedua tahun 2016 ini, BPK memulai suatu era baru dalam proses rekrutmen posisi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama yaitu melalui proses seleksi terbuka atau biasa disebut lelang jabatan. Proses ini merupakan best pratice dalam tataran pengelolaan sumber daya manusia dan sudah diterapkan di beberapa instansi kementerian. BPK mengimplementasikan proses ini bukan untuk sekadar mengikuti trend saja tetapi lebih kepada pemenuhan amanat undang-undang dalam rangka mencari pemimpin terbaik bagi BPK yang dapat meningkatkan kinerja BPK yang pada akhirnya akan menaikkan citra BPK di dalam masyarakat. Terlepas dari proses yang sedang berjalan, proses ini tentunya memberikan banyak manfaat positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh BPK sebagai organisasi maupun para pelamar sebagai individu.

Sebagai organisasi, adanya proses lelang jabatan menunjukkan bahwa BPK masih tetap konsisten di jalur Reformasi Birokrasi khususnya pada area pengembangan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, proses lelang jabatan juga menunjukkan komitmen BPK dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang juga tercermin dari bagaimana BPK berusaha juga transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya manusianya.

Proses lelang jabatan juga memberikan manfaat positif bagi individu pelamarnya. Proses ini mendorong timbulnya semangat kompetisi yang sehat di antara para pelamar. Proses ini juga menimbulkan keinginan untuk senantiasa



mengembangkan diri, memberikan pengalaman baru, lebih tertib administrasi yang akan membantu dalam proses seleksi administrasi. Lebih jauh lagi, secara tidak langsung, proses ini memberikan energi positif bagi para pegawai bahwa terdapat kesempatan dan peluang yang sama bagi seluruh pegawai BPK untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi.

Proses lelang jabatan ini merupakan salah satu bentuk kemajuan organisasi BPK dan merupakan iklim/atmosfir yang sangat baik bagi proses implementasi dari fungsi-fungsi dan seluruh kegiatan yang berjalan di BPK secara bersama-sama untuk mencatatkan BPK New Era dimasa depan.

KOREK PERS

KPK: Penyelidikan Sumber Waras Masih Berjalan (Suara Pembaruan, 16/6/2016)

KPK menyebut penyelidikan pembelian lahan untuk pembangunan RSSW oleh Pemprov DKI masih terus berjalan. "Tidak ada perbuatan melawan hukum sampai sekarang ini. Penyelidikan masih jalan terus," kata Komisioner KPK Laode Syarif. Pihaknya akan berkonsolidasi dengan BPK, hal ini lantaran penyelidikan yang dilakukan KPK berdasar hasil audit BPK.

Pembelian Lahan Cengkareng Diinvestigasi (Republika, 28/6/2016)

Wagub DKI Djarot menduga adanya kerugian yang terjadi dalam pembelian lahan di kawasan Cengkareng. Nilai pembelian lahan itu lebih besar ketimbang pembelian lahan RSSW. Tanah seluas 4,6 hektare dibeli Pemprov DKI pada November 2015 seharga Rp648 miliar. Djarot meminta BPK melakukan audit investigasi agar duduk persoalan dapat dengan jelas terungkap.

Pansus Segera Dibentuk, Bakal Usut 50 Temuan BPK (Rakyat Merdeka, 13/7/2016)

DPRD DKI akan membentuk pansus untuk mengusut kasus lahan di Cengkareng. Ide pembentukan pansus lahir pasca BPK menemukan adanya transaksi aneh pengadaan lahan untuk pembangunan rusun sewa DKI. Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif menjelaskan, pansus nantinya juga bertugas mengusut 50 temuan BPK lainnya yang bernilai total Rp30,15 triliun pada TA 2015.

CASCISCUS

Warta : Ti, Warti (sambil berlari menghampiri Warti) apa kabar Warti ? Mohon maaf lahir batin ya Ti, atas segala kesalahan ku selama ini baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Ti.

Warti : Baik Ta, iya Ta, aku juga mohon maaf atas kesalahanku selama ini ya Ta, semoga kita berdua bisa kembali suci setelah Ramadhan kemarin ya Ta.

Warta : Iya Ti, Amiin, oh ya Ti ayo maen ke ruangan ku dulu yuk, ada oleh-oleh sedikit nih dari mudik kemarin.

Warti : Ooo jadi kamu kemarin jadi mudik ya Ta? Bagiamana perjalanannya pasti macet banget ya Ta.

Warta : Waduh perjalanannya macet parah Ti, apalagi waktu di Tol Brebes Ti, aku sama keluargaku sampai 12 jam di dalam mobil terus Ti.

(saat sedang asyik ngobrol tiba-tiba perhatian warta dan warti dialihkan dengan sekerumunan wartawan)

Warti : Ada apa tuh, Ta. Banyak banget wartawan ngumpul di gedung umar wirahadikusumah. Sedang ada sosialisasi kah sampai ada wartawan sebanyak itu?

Warta : Iya Ti, gak tau Ti, padahal juga baru hari pertama masuk kerja nih setelah lebaran, kok langsung ada kegiatan sosialisasi Ti.

Warti : Bukan Ta, bukan sosialisasi teryata Ta, ada menteri Ta, menteri siapa itu deh Ta? Aku lupa (sambil menunjuk seorang pria yang di kelilingi oleh wartawan)

Warta : Mana Ti? oh itu Ti, itu Bapak Menteri PAN RB Ti, Bapak Yuddy Chrisnandi Ti.

Warti : Wah pasti Bapak Menteri PAN RB datang ke BPK buat SIDAK ya Ta? Selepas liburan lebaran kemarin ya Ta.

Warta : Iya Ti sepertinya begitu.

Warti : Wah gawat BPK kena SIDAK, bisa-bisa nama BPK tercemar nih Ta.

Warta : Hahaha (sambil tertawa) ya engga mungkinlah Ti tercemar nama BPK, justru ini sebagai suatu penghargaan dari MenPAN RB kepada BPK Ta. karena selepas liburan lebaran, pegawai BPK tidak ada yang telat ataupun yang tidak masuk tanpa alasan yang tidak jelas.

Warti : Oh gitu ya Ta, ya udah kalo gitu ayo kita ke sana Ta (sambil menunjuk kerumunan wartawan)

Warta : Memang buat apa Ti kita kesana ? katanya mau ke ruanganku buat ambil oleh oleh.

Warti : Iya Ta, tapi setelah foto bareng sama Bapak Ganteng itu ya. Pak Yuddy Chrisnandi.

Warta : Aduuuhhh Warti......Warti.

BPK SERAHKAN LHP KEPADA KEMENKES, KEMENDIKBUD, DAN BPOM



Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian/lembaga tersebut, memperoleh Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK.

Anggota BPK didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VI, Syafrudin Mosii menyerahkan langsung LHP kepada Menteri Kesehatan, Nila F. Moloelok dan Plt. Kepala BPOM, Bahdar J. Hamid, serta Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta, Selasa (21/6).

Anggota BPK mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, Kemendikbud belum menyelesaikan 19,27% rekomendasi dan 13,67% rekomendasi belum ditindaklanjuti. "Jadi, total barangkali baru mencapai 67% (rekomendasi yang telah diselesaikan) di kementerian pendidikan dan kebudayaan," ungkapnya.

Sementara itu, Kemenkes telah menyelesaikan 67,57% rekomendasi, 30,90% rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti, dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 1,53%. Sedangkan BPOM telah menyelesaikan 89,40% rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti sebesar 10,60%.

Pada kesempatan tersebut Anggota BPK berharap agar tindak lanjut rekomendasi BPK segera dituntaskan. "Saya berulang kali mengatakan, bahwa amanat setelah laporan (LHP) ini kami berikan, dalam 60 hari kerja, seluruh rekomendasi bisa diselesaikan," tegasnya. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan menjadi catatan yang menjadi persoalan dari hari ke hari.

BPK APRESIASI K/L YANG MEMPEROLEH OPINI WTP

Anggota II BPK, Agus Joko Pramono pada Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2015 pada Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual untuk pertama kalinya ini memberikan tantangan tersendiri, "Penerapan akuntansi berbasis akrual pertama kali ini cukup menyebabkan syok tinggi bagi *auditee* maupun auditor", ungkapnya.

Oleh karena itu, BPK mengapresiasi K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Pada penerapan akuntansi berbasis akrual pertama kali ini hampir semua LK WTP, hanya dua yang tidak. Ini perlu diapresiasi, hal ini merupakan prestasi yang cukup luar biasa," tegas Anggota BPK dihadapan para undangan yang hadir pada acara yang dilaksanakan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis (14/07).



24 K/L MEMPEROLEH OPINI WTP



BPK menyerahkan LHP atas LK TA 2015 kepada 37 Kementerian/ Lembaga di lingkungan AKN III. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi kepada menteri dan pimpinan lembaga pada 37 K/L, di Auditorium BPK, Rabu (29/6).

Anggota BPK menyebutkan, sebanyak 24 K/L memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 10 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebanyak 3 K/L.

Pada acara tersebut, BPK merekomendasikan K/L untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal terhadap pengelolaan realisasi belanja sesuai dengan ketentuan, serta penatausahaan dan inventarisasi aset secara memadai dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

LINTAS PERWAKILAN

SOSIALISASI KEGIATAN PENGAWASAN PADA BPK PERWAKILAN RIAU

Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM) terdiri dari 9 pilar, dimana salah satunya adalah pilar kinerja pemeriksaan yang membantu pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan. Seorang pemeriksa harus hati-hati, cermat dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, serta harus menjaga suasana kerja agar tidak terdistorsi baik independensi maupun integritasnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Utama BPK, Mahendro Sumardjo dalam paparannya pada Sosialisasi Kegiatan Pengawasan-Sinergi Dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Riau yang diikuti oleh para pejabat serta pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Acara yang dimoderatori oleh Kepala Perwakilan, Harry Purwaka tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Riau, pada hari Jumat, (17/6).

Menurut Inspektur Utama, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan mutu hasil pemeriksaan, diantaranya peningkatan kompetensi pemeriksa, melakukan komunikasi yang baik dengan entitas, dan penyusunan kertas kerja pemeriksaan dengan baik.

MEWUJUDKAN LHP YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengadakan Media *Workshop* dengan tema "Mewujudkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat" di kantor BPK Perwakilan Kaltara. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, (23/6) tersebut dihadiri oleh wartawan dari berbagai media cetak, radio, dan online, serta televisi.

Bertindak sebagai pembicara dalam acara ini adalah Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana dengan didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Utara, Ramzuhri. Pada Media *Workshop* kali ini, pembicara mengajak peserta untuk memahami berbagai informasi yang terkandung dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. BPK berharap nantinya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan

kerjasama yang saling mendukung antara BPK dan media dalam menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan secara jelas dan akurat kepada publik.

BPK SULSEL MERAMPUNGKAN PENYERAHAN LHP ATAS 25 ENTITAS

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 5 (lima) entitas pemeriksaan. Penyampaian LHP kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Andi Kangkung Lologau, di ruang Auditorium BPK Perwakilan Sulsel, Senin (27/6). Entitas pemeriksaan tersebut adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Luwu Timur.

Dengan disampaikannya LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada kelima entitas tersebut, BPK telah merampungkan penyerahan LHP atas LKPD kepada 25 entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Sulsel.

GALERI FOTO



Ketua BPK, Harry Azhar Azis disambut oleh wartawan usai melakukan pertemuan dengan sejumlah wartawan LSM pendukung BPK dalam menuntaskan kasus Rumah Sakit Sumber Waras pada tanggal 20 Juni 2016 di Ruang Pola.



Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara membuka *Workshop* Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Tata Kelola Pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 28 Juni 2016.



Ketua BPK, Harry Azhar Azis berjabat tangan dengan Director of MSI's Institute for Public Accountability, Joseph Christoff di Ruang tamu Ketua BPK pada tanggal 23 Juni 2016.



Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi di Kantor Pusat BPK RI yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan pada 11 Juli 2016.

» KABAR SELINTAS

KELUARGA BESAR BPK SELENGGARAKAN HALALBIHALAL HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H

Untuk mempererat tali silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1437 H, keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan halalbihalal pada hari Kamis, 14 Juli 2016. Bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK, hadir dalam acara tersebut Ketua BPK, Harry Azhar Azis, Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, dan Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi, serta pejabat dan pegawai di lingkungan BPK. Selain itu hadir pula Mantan Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Anggota Ikistra (Ikatan Istri Anggota BPK).

BPK sambutannya, Melalui Ketua mengatakan bahwa Idul Fitri menjadi momen yang sangat tepat bagi setiap orang untuk KORPRI DAN DHARMA WANITA BPK SELENGGARAKAN BAZAAR RAMADHAN

KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) dan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat

Jenderal BPK mengadakan Bazaar Ramadhan 1437 H, yang berlangsung di Kantor Pusat BPK Jakarta pada 24 Juni 2016. Pembukaan Bazaar dilakukan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis dan dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, Anggota BPK V, Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota VII BPK, Achsansul Qosasi, Sekjen Hendar Ristriawan, Inspektur Utama BPK sekaligus Ketua KORPRI, Mahendro Sumardjo, para pejabat di lingkungan BPK, dan Anggota Ikistra BPK serta Dharma Wanita Persatuan Setjen BPK.

Bazaar ini bertujuan untuk memenuhi

> sebagian pegawai akan sembako dengan harga lebih yang murah dibanding di supermarket atau tradisional. pasar Pada bazaar kali tersedia ini. booth bazaar yang menyediakan aneka makanan sembako, siap saji, keperluan rumah tangga serta pakaian dewasa dan pakaian anakanak. Di dalam bazaar

kebutuhan

panitia Bulog bekerjasama dengan untuk dan menyediakan sembako

daging, Kementerian Perdagangan untuk menyediakan gula dengan harga murah, dan PD Dharma Jaya untuk menyediakan daging dengan harga murah.

Selain itu panitia bazaar juga bekerjasama



dengan seluruh Satuan Kerja di lingkungan AKN, Satker Eselon I yaitu Sekjen, Ditama Revbang, Itama dan Binbangkum untuk pengadaan paket sembako yang akan dibagikan kepada tenaga Cleaning Service, pegawai honorer, dan tenaga pengamanan di lingkungan BPK.

Dalam sambutannya Ketua BPK dan seluruh pimpinan BPK menyambut baik inisatif dilaksanakannya Bazaar Ramadhan ini. Ketua BPK berharap bazaar ini sebagai wujud saling peduli diantara keluarga besar BPK. Semangat seperti ini perlu dipupuk dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan agar semua pegawai BPK merasa sebagai keluarga besar yang saling peduli satu sama lain. Selain sebagai sarana transaksi jula beli, Ketua BPK juga berharap agar bazaar ini dapat menjadi forum silaturahmi bagi seluruh pegawai BPK.



mensucikan diri. Memeriksa diri akan lebih sulit daripada memeriksa orang lain, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan derajad yang tinggi di muka Allah SWT. Untuk itu, beliau mengajak agar kesempatan acara ini sebaik-baiknya untuk saling memaafkan dan bersama-sama memulai lembaran baru yang penuh ketulusan dan semangat baru, sehingga berdampak pada kelembagaan di masa yang akan datang.

Mengakhiri sambutannya, Ketua BPK secara pribadi memohon maaf atas segala khilaf yang pernah dilakukan, dan berharap agar kiranya Allah SWT senantiasa mengiringi langkah seluruh pegawai dalam menjalankan tugas mengabdi kepada nusa dan bangsa.

Acara yang berlangsung khidmad dan penuh keceriaan ini ditutup dengan saling bersalaman dan bermaaf-maafan antara Pimpinan BPK dengan seluruh pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

>> RENUNGAN

Kadang dosa tercipta dalam tawa. kadang luka terbesit dalam canda. angkuh terlintas dalam senyuman. manusia tak ada yang sempurna. maka maafkanlah pribadi yang tidak luput dari dosa ini. Tagobalallahu minna waminkun. Mohon Maaf Lahir dan Batin.

pesansimbah.com